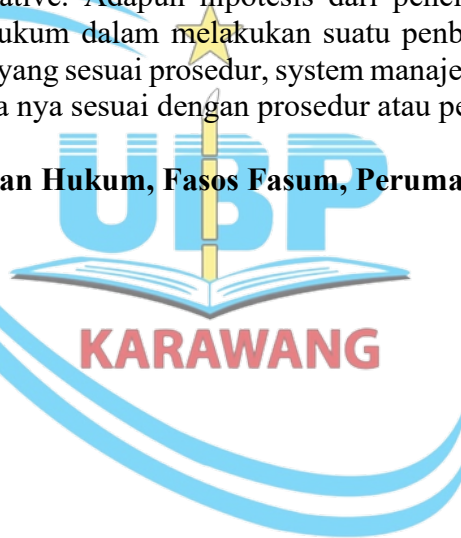


ABSTRAK

Negara mempunyai tanggung jawab untuk menyiapkan atau memberi kemudahan bagi warga negaranya untuk mendapatkan rumah melalui program perumahan rakyat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa suatu perumahan haruslah dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas umum. Adapun permasalahannya bagaimana akibat hukum terhadap konsumen perumahan atas tidak dilaksanakannya penyerahan fasos fasum dengan pemerintah dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan atas tidak dilaksanakannya penyerahan fasos fasum perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu perlu adanya suatu kepastian hukum dalam melakukan suatu pembangunan perumahan baik dari tata kelola lahan yang sesuai prosedur, system manajemen yang sistematis, serta hal-hal lain yang kira nya sesuai dengan prosedur atau peraturan itu sendiri.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Fasos Fasum, Perumahan



ABSTRACT

The state has the responsibility to prepare or make it easier for its citizens to get a house through the public housing program. Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlements in Article 1 point 2 states that a housing must be equipped with facilities, infrastructure, and public facilities. As for the problem, what are the legal consequences for housing consumers for not implementing the delivery of social and public facilities with the government and how is the legal protection for housing consumers for not implementing the delivery of social public facilities for housing in terms of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. The research method used is a normative juridical approach, while the hypothesis of this research is that there is a need for legal certainty in carrying out a housing development, both from land management according to procedures, a systematic management system, and other things that are considered appropriate procedure or regulation itself.

Keywords: *Legal Protection, Social Fasum, Housing*

